

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DI DISTRIK WALESI KABUPATEN JAYAWIJAYA: ANALISIS KETIMPANGAN INFRASTRUKTUR DAN REALITAS OPERASIONAL

Irsan Yelipele^{1*}, Tukijan², Sukmawati³

^{1,2,3} Universitas Amal Ilmiah Yapris Wamena, Papua Pegunungan

*Korespondensi : irsanpele308@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah terpadu di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, dengan fokus pada ketimpangan infrastruktur dan realitas operasional di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi kelembagaan, minimnya Tempat Penampungan Sementara (TPS), belum tersedianya fasilitas pendukung 3R, serta terbatasnya armada pengangkut menjadi hambatan utama. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah memperburuk kondisi lingkungan, seperti munculnya TPS liar, pencemaran, dan penyumbatan drainase. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Distrik Walesi masih menghadapi tantangan kebijakan, teknis, dan sosial sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan infrastruktur, dan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Implementasi Kebijakan, Infrastruktur, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of integrated waste management policy in Wamena District, Jayawijaya Regency, focusing on infrastructure inequality and operational realities. The study employed a qualitative descriptive approach using observation, semi structured interviews, and documentation. Informants included the Environmental Agency, sanitation workers, community leaders, and local residents selected through purposive sampling. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing with triangulation techniques. The findings reveal that the implementation of waste management policy has not been optimal. Budget limitations, weak institutional coordination, lack of Temporary Waste Disposal Sites (TPS), absence of 3R supporting facilities, and limited waste transportation fleets are the main obstacles. In addition, low community participation in waste segregation has worsened environmental conditions, including illegal dumping sites, pollution, and drainage blockage. This study concludes that waste management in Wamena District still faces

policy, technical, and social challenges, requiring institutional strengthening, infrastructure improvement, and community based participatory approaches.

Keywords : *Waste Management, Policy Implementation, Infrastructure, Community Participation.*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan aktivitas ekonomi di Distrik Walese sebagai pusat logistik di wilayah Pegunungan Papua membawa konsekuensi langsung terhadap meningkatnya volume timbunan sampah (Wati & Septiani, 2023). Dinamika ini tidak hanya dipengaruhi oleh mobilitas barang dan jasa, tetapi juga oleh pertumbuhan penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada produk kemasan (Pinder et al., 2021). Dalam konteks ini, persoalan sampah tidak lagi dapat dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan (Putra et al., 2021). Faktanya, peningkatan daya beli masyarakat terhadap berbagai komoditas dan hasil teknologi juga berkontribusi signifikan terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan, yang memerlukan sistem pengelolaan yang efektif (Madani, 2011).

Tanpa metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, peningkatan volume sampah ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan, termasuk ekosistem pemukiman, hutan, persawahan, sungai, dan laut (Qadri et al., 2020). Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah eksisting yang belum adaptif terhadap laju peningkatan timbunan sampah, sehingga berpotensi memperburuk kualitas

lingkungan dan kesehatan publik di wilayah tersebut (Wijayanti et al., 2023). Hal ini sering kali diakibatkan oleh infrastruktur pengelolaan sampah yang belum memadai serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan limbah (Tjenreng & Suryana, 2025).

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah merespons kondisi tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya kemandirian dan keberlanjutan dalam tata kelola sampah. Regulasi ini secara normatif telah mengarahkan perubahan paradigma dari sistem tradisional kumpul-angkut-buang menuju sistem pengelolaan terpadu yang berbasis pada pengurangan sampah dari sumbernya (Asiyah, 2019). Namun, implementasi peraturan ini sering terkendala oleh kurangnya integrasi kebijakan, terbatasnya dukungan serta peran serta masyarakat, dan minimnya infrastruktur yang menunjang praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan inovatif (Gobai et al., 2021). Berbagai studi terdahulu juga mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti rendahnya akses terhadap layanan pengelolaan sampah dan kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya (Manalu et al., 2022). Selain itu, fragmentasi koordinasi antar sektor dan alokasi anggaran daerah yang

belum memadai turut memperburuk kesenjangan antara formulasi regulasi dan realisasi operasional di lapangan (Yanti, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ditetapkan, tantangan implementasi masih signifikan, mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang semuanya krusial untuk efektivitas kebijakan (Suryanti et al., 2025). Penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir akibat ketiadaan pemilahan dan infrastruktur yang terbatas semakin memperparah kondisi ini, meskipun truk pengangkut sampah beroperasi setiap hari (Edrial et al., 2025). Faktor-faktor penghambat lainnya termasuk kurangnya sosialisasi kebijakan, kapasitas infrastruktur yang terbatas, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan dukungan anggaran yang tidak memadai (Rahmania et al., 2025). Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut hingga tahun 2026 belum menunjukkan hasil yang signifikan di tingkat operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka regulasi telah ditetapkan, tantangan fundamental seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesadaran publik, dan efektivitas pengawasan masih menghambat tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang optimal (Haryanti, 2020; Nurlaeli et al., 2025).

Kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah. Instrumen kebijakan yang telah dirancang belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan yang memadai (Okhtafianny & Ariani, 2025). Oleh karena itu, optimalisasi implementasi kebijakan

memerlukan identifikasi hambatan-hambatan spesifik serta perumusan strategi intervensi yang menasar aspek komunikasi, kapasitas sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi guna mencapai efektivitas pengelolaan sampah (Almaysuri, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menyoroti kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, seperti kurangnya sumber daya dan komunikasi yang tidak efektif antara pemangku kepentingan (Zulfa, A. A., Rahmawati, R., Purnamasari et al., 2025). Akibatnya, berbagai program yang dicanangkan cenderung berhenti pada tahap sosialisasi tanpa diiringi dengan implementasi yang konsisten dan terukur.

Salah satu indikator nyata dari stagnasi tersebut adalah belum berjalannya konsep Reduce, Reuse, Recycle (3R) secara optimal di Distrik Walese. Meskipun terdapat instruksi resmi dari pemerintah daerah terkait pemilahan sampah di tingkat sumber, praktik di masyarakat masih menunjukkan pola pencampuran antara sampah organik dan anorganik. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan fasilitas pendukung seperti bank sampah dan unit pengolahan komunal yang seharusnya menjadi tulang punggung implementasi konsep 3R.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dasar berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) turut memperburuk situasi pengelolaan sampah di wilayah ini. Tidak tersedianya titik penampungan resmi mendorong masyarakat untuk memanfaatkan ruang publik sebagai lokasi pembuangan sampah, sehingga memunculkan fenomena TPS liar di berbagai titik strategis kota. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah

terganggunya fungsi drainase perkotaan yang berujung pada peningkatan risiko banjir, khususnya pada saat curah hujan tinggi.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan distribusi layanan pengangkutan sampah. Armada yang tersedia cenderung difokuskan pada jalur utama kota, sementara wilayah pinggiran dan permukiman padat kurang mendapatkan akses layanan yang memadai. Ketidakmerataan ini menyebabkan penumpukan sampah dalam jangka waktu yang lama, yang pada akhirnya mendorong masyarakat mengambil langkah alternatif seperti pembakaran terbuka yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara.

Lebih jauh, hambatan dalam implementasi kebijakan juga berkaitan erat dengan aspek kelembagaan dan pembiayaan. Ketidaksinkronan antara mandat regulasi dan alokasi anggaran mengakibatkan berbagai rencana strategis tidak dapat direalisasikan secara optimal. Upaya pembaruan melalui studi banding ke daerah lain belum diikuti dengan langkah konkret dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi geografis Wamena, seperti kendaraan pengangkut berukuran kecil yang mampu menjangkau area sempit.

Dengan demikian, persoalan pengelolaan sampah di Distrik Walesi mencerminkan kompleksitas tantangan tata kelola lingkungan di daerah berkembang. Diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penataan sistem pembiayaan yang berkelanjutan. Pendahuluan ini menjadi dasar untuk

mengkaji lebih lanjut berbagai faktor penghambat sekaligus merumuskan strategi perbaikan yang relevan dengan konteks lokal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai kondisi pengelolaan sampah di Distrik Walesi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan sampah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta perilaku masyarakat dalam menangani dan mengelola sampah.

Lokasi penelitian berada di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu penerapan konsep 3R, ketersediaan sarana seperti TPS, serta distribusi layanan pengangkutan sampah. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, dan masyarakat. Data sekunder berasal dari dokumen resmi, peraturan daerah, serta laporan instansi terkait.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan sampah (Febrianti et al., 2022). Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan temuan penelitian, peneliti menerapkan teknik

triangulasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber serta menggunakan beberapa metode pengumpulan data (Subandriyo & Supardal, 2026).

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami mengenai kondisi serta permasalahan pengelolaan sampah di Distrik Walesi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan, Kelembagaan, dan Pembiayaan Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Distrik Walesi secara normatif telah memiliki arah yang jelas. Temuan penelitian tersebut dapat dikaji dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut memiliki keterkaitan dan secara bersama-sama menentukan efektivitas implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan sampah di Distrik Walesi, keempat aspek tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan kondisi pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah merumuskan kebijakan yang mengacu pada pengelolaan sampah terpadu, termasuk penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun, berdasarkan temuan lapangan,

pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Menurut keterangan informan dari Dinas Lingkungan Hidup, keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, kondisi tersebut mencerminkan adanya kendala pada aspek sumber daya. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan karena pelaksana membutuhkan dukungan anggaran, fasilitas, infrastruktur, serta tenaga yang memadai agar kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan keterbatasan tersebut, kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan belum cukup apabila tidak didukung oleh sumber daya implementasi yang memadai. Temuan ini sejalan dengan (Manalu et al., 2022) dan (Rahmania et al., 2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan dukungan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Kondisi ini berdampak langsung pada belum terealisasinya berbagai program strategis yang telah direncanakan. Keterbatasan pembiayaan juga mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Selain itu, aspek kelembagaan juga menunjukkan adanya kelemahan, terutama dalam hal koordinasi antar pihak. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui aspek struktur birokrasi dalam teori Edward III. Struktur birokrasi mencakup pengaturan pembagian tugas, pola koordinasi

antarbagian, serta prosedur yang menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Belum optimalnya koordinasi antara pihak yang terlibat menunjukkan bahwa struktur pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan masih berjalan secara sektoral dan belum menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Hasil wawancara dengan petugas pengangkut sampah mengindikasikan bahwa pengelolaan jadwal dan distribusi layanan belum terorganisasi secara efektif. Hal ini mencerminkan belum optimalnya integrasi antar aktor dalam sistem pengelolaan sampah. Dari perspektif kebijakan, ditemukan bahwa implementasi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi lokal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Dalam perspektif implementasi Edward III, sumber daya tidak hanya berkaitan dengan jumlah fasilitas yang tersedia, tetapi juga kesesuaiannya dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penggunaan armada yang tidak sesuai dengan kondisi geografis wilayah dapat menyebabkan pelayanan pengangkutan sampah menjadi kurang efektif. Misalnya, penggunaan armada pengangkut yang tidak sesuai dengan karakteristik geografis wilayah menyebabkan rendahnya efektivitas pelayanan. Di sisi lain, belum adanya pengaturan yang jelas terkait peran pelaku usaha dalam pengelolaan sampah menunjukkan adanya kekosongan dalam implementasi kebijakan pada sektor non-rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan

sampah di Distrik Walesi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, dukungan pembiayaan, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak yang terlibat.

2. Infrastruktur dan Sistem

Operasional Pengelolaan Sampah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek infrastruktur dan sistem operasional merupakan faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di Distrik Walesi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya Tempat Penampungan Sementara (TPS). Minimnya TPS menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi persoalan sumber daya. Dalam teori Edward III, ketersediaan fasilitas merupakan bagian penting dari sumber daya implementasi. Kebijakan pengelolaan sampah tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat tidak memiliki fasilitas yang memungkinkan mereka melaksanakan ketentuan tersebut. Dengan demikian, munculnya TPS liar dapat dipahami bukan hanya sebagai persoalan perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai konsekuensi dari belum memadainya fasilitas pelayanan yang disediakan pemerintah. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk membuang sampah di lokasi terbuka, sehingga memunculkan fenomena TPS liar di berbagai titik, terutama di kawasan permukiman padat, pasar, dan pinggir jalan. Keberadaan TPS liar ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, fasilitas pendukung penerapan konsep 3R, seperti bank sampah dan unit pengolahan sampah terpadu, belum tersedia secara memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tujuan kebijakan untuk mengurangi sampah dari sumber belum didukung oleh sumber daya yang memadai. Konsep 3R membutuhkan fasilitas dan mekanisme pengelolaan yang memungkinkan masyarakat melakukan pemilahan, penggunaan kembali, dan pengolahan sampah. Apabila fasilitas tersebut tidak tersedia, maka masyarakat cenderung kembali pada pola konvensional kumpul, angkut, dan buang. Dengan demikian, keterbatasan fasilitas menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa implementasi konsep 3R belum berjalan optimal di Distrik Walesi. Akibatnya, upaya pengurangan sampah dari sumber tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Praktik pengelolaan sampah yang terjadi masih didominasi oleh pola konvensional, yaitu kumpul, angkut, dan buang.

Dari sisi operasional, keterbatasan armada pengangkut menjadi kendala yang signifikan. Temuan tersebut kembali memperlihatkan pentingnya aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan. Jumlah armada yang terbatas menyebabkan kapasitas pelayanan tidak sebanding dengan volume sampah yang harus ditangani. Selain jumlah armada, kesesuaian kendaraan dengan kondisi geografis juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, pengadaan sarana pengangkutan perlu mempertimbangkan kondisi jalan, kepadatan permukiman, dan karakteristik wilayah pelayanan agar sumber daya yang tersedia benar-benar mampu mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Informan dari petugas pengangkut sampah menyatakan

bahwa jumlah kendaraan yang tersedia tidak sebanding dengan volume sampah yang harus ditangani setiap hari. Selain itu, distribusi layanan pengangkutan masih terpusat pada wilayah inti kota, sehingga daerah pinggiran kurang mendapatkan pelayanan yang memadai. Kondisi geografis wilayah yang memiliki akses jalan sempit dan sulit dijangkau juga menjadi faktor penghambat dalam operasional pengangkutan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem operasional yang diterapkan belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik lokal wilayah Wamena.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan adanya ketimpangan antara ketersediaan infrastruktur dan kebutuhan riil di lapangan. Ketidakseimbangan tersebut berdampak langsung pada rendahnya efektivitas pengelolaan sampah secara menyeluruh.

3. Perilaku Masyarakat, Partisipasi, dan Dampak Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perilaku masyarakat dan tingkat partisipasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah. Namun demikian, sebagian besar masyarakat di Distrik Walesi belum memiliki pemahaman yang memadai terkait pengelolaan sampah. Jika dikaitkan dengan teori Edward III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Komunikasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga mengenai kejelasan pesan, konsistensi, dan kemampuan masyarakat memahami serta menerapkan kebijakan tersebut. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, masih adanya praktik pencampuran sampah menunjukkan

bahwa informasi yang diberikan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan antara sampah organik dan anorganik.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat cenderung mencampur sampah dalam satu wadah. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pemahaman, tetapi juga karena tidak tersedianya fasilitas pemilahan yang mendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sistem pendukung yang memadai. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah, pendekatan yang digunakan dinilai belum efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih cenderung bersifat satu arah. Dalam perspektif Edward III, komunikasi yang efektif membutuhkan penyampaian informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh kelompok sasaran. Sosialisasi yang tidak diikuti dengan pendampingan, fasilitas, dan mekanisme evaluasi menyebabkan masyarakat sulit mengubah informasi yang diterima menjadi tindakan nyata. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan perlu dikembangkan melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Sosialisasi yang bersifat satu arah dan tidak diikuti dengan implementasi nyata di lapangan menyebabkan masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari program tersebut.

Tokoh masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini menilai bahwa rendahnya partisipasi masyarakat bukan semata-mata karena kurangnya kesadaran, Temuan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai

persoalan kesadaran individu. Partisipasi juga dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah membangun mekanisme keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan program membutuhkan dukungan dan penerimaan kelompok sasaran. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan ruang untuk terlibat dalam pemilahan, pengurangan, pengawasan, dan pengelolaan sampah di lingkungan mereka. melainkan karena tidak adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif. Pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih relevan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dari sisi dampak, kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Keberadaan TPS liar menyebabkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Selain itu, penumpukan sampah di beberapa titik juga menyebabkan penyumbatan saluran drainase yang berpotensi menimbulkan genangan air, terutama pada saat musim hujan.

Aktivitas pelaku usaha juga turut berkontribusi terhadap peningkatan volume sampah, khususnya dari sektor perdagangan. Namun, belum adanya sistem pengelolaan yang jelas bagi pelaku usaha semakin memperumit kondisi yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek perilaku dan partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah. Tanpa adanya dukungan sosial yang kuat, kebijakan dan infrastruktur yang tersedia tidak akan mampu berjalan secara efektif. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dilihat bahwa

perilaku masyarakat merupakan hasil interaksi antara faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, dan mekanisme kelembagaan. Rendahnya pemilahan sampah tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan belum tersedianya fasilitas pemilahan dan belum efektifnya komunikasi kebijakan. Dengan demikian, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan dukungan sistem pelayanan yang memungkinkan masyarakat menjalankan kebijakan secara nyata.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah terpadu di Distrik Walesi masih belum mencapai hasil yang optimal, meskipun dari sisi regulasi telah memiliki dasar kebijakan yang cukup jelas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan kebijakan dengan penerapannya di lapangan yang menjadi salah satu faktor utama rendahnya efektivitas pengelolaan sampah. Dari aspek kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan, ditemukan bahwa keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar pihak, serta belum adaptifnya kebijakan terhadap kondisi lokal menjadi faktor penghambat utama. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai, sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara konsisten dan terintegrasi.

Dari aspek infrastruktur dan sistem operasional, keterbatasan sarana dan prasarana seperti minimnya TPS, tidak tersedianya fasilitas 3R, serta terbatasnya armada pengangkut sampah menyebabkan pelayanan pengelolaan sampah tidak

merata. Kondisi ini diperparah oleh faktor geografis yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam perencanaan operasional, sehingga menimbulkan ketimpangan layanan antara wilayah pusat dan pinggiran.

Sementara itu, dari aspek perilaku masyarakat, rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi tantangan yang signifikan. Praktik pemilahan sampah belum berjalan karena tidak didukung oleh fasilitas yang memadai dan pendekatan sosialisasi yang efektif. Dampaknya, muncul berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, penumpukan sampah, serta gangguan terhadap sistem drainase.

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah di Distrik Walesi masih menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup aspek kebijakan, teknis, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Distrik Walesi belum optimal karena terdapat persoalan pada empat aspek implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat, aspek sumber daya masih menghadapi keterbatasan anggaran dan infrastruktur, aspek disposisi belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas pelaksana dan keterlibatan kelompok sasaran, sedangkan aspek struktur birokrasi masih menghadapi persoalan koordinasi antaraktor. Keempat persoalan tersebut saling berkaitan dan

menghasilkan kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik pengelolaan sampah di lapangan. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan efektivitas pengelolaan sampah memerlukan pendekatan implementasi yang terintegrasi dengan memperkuat komunikasi, menyediakan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan lokal, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memperjelas koordinasi antaraktor.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Almaysuri, F. (2025). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah tangga Dan Sampah Sejenis Di Kabupaten Lampung tengah*. In Digilib Repository Unila (Lampung University).
- Asiyah, N. (2019). Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 316–327.
- Edrial, E., Ramdani, M. L., & Salahuddin, M. (2025). Implementasi Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 6(1), 486–493.
- Febrianti, R., Dewi, R., & Mardiah, A. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. *PUBLICNESS Journal of Public Administration Studies*, 1(2), 103–116.
- Gobai, K. R. M., Surya, B., & Syafri, S. (2021). Kinerja Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Urban and Regional Studies Journal*, 2(2), 37–45.
- Haryanti, N. (2020). Implementasi Public Private Partnership Sebagai Usaha Keberhasilan Pengembangan Pariwisata di Era Global. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(1), 24–43.
- Madani, M. (2011). Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285–292.
- Nurlaeli, R., Frinaldi, A., Rembrandt, R., Lanin, D., & Umar, G. (2025). Menelaah Tata Kelola Pengangkutan Sampah Dan Analisis Dampak Lingkungan Di Kota Cilegon: Kajian Literatur. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 14(2), 146–160.
- Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 14(2), 146–160.
- Pinder, J., Rumsowek, M., Mate, C. Y., Ansanay, A. L., Ilham, I., & Muttaqin, M. Z. (2021). *Implementation of Instructions on the Prohibition of Use Policy Plastic Bags in Jayapura City in Pandemic Situation*. Advances in Economics, Business and Management Research/Advances in Economics, Business and Management Research.

- Putra, A. M., Hartini, H., Widiyanti, B. L., & Haerudin, H. (2021). Sosialisasi Zero Waste dan coaching clinic pengolahan sampah di Desa Labuhan Haji. *ABSYARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 72–84.
- Qadri, U., Wahyuni, R., & Listiyawati, L. (2020). Inovasi Manajemen Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan di Kota Pontianak berbasis Aplikasi. *Eksos*, 16(2), 144–160.
- Rahmania, N., Abdurrahman, A., & S, M. A. D. (2025). Implementasi Kebijakan Perda No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu). *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 11(2), 144–156.
- Subandriyo, S., & Supardal, S. (2026). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon Paliyan. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(1), 504–516.
- Suryanti, I. M., Mawaddah, N., Yani, A., & Irawanto, I. (2025). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(3).
- Tjenreng, M. B. Z., & Suryana, N. (2025). Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bogor: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 17(1), 123–135.
- Wati, M., & Septiani, A. A. (2023). Peningkatan Kreativitas Anak dalam Pemanfaatan Sampah Bekas Guna untuk Menumbuhkan Kesadaran Pelestarian Lingkungan. *E-Dimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(3), 539–543.
- Wijayanti, A. N., Dhokhikah, Y., & Rohman, A. (2023). Analisis partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 28–45.
- Yanti, N. N. K. (2026). Analisis Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Indonesia: Studi Literatur Tentang Efektivitas Implementasi Dan Tantangan. *Locus*, 18(100–119).
- Zulfa, A. A., Rahmawati, R., Purnamasari, I., Hernawan, D., Wahyudin, C., Apriliani, A., Ramdani, F. T., Syahrudin, D., & Saepudin. (2025). Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Governansi*, 11(2), 153–162.